

**PERAN BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PROSES  
PENGAJUAN PERCERAIAN GURU**

**Studi Kasus Perceraian Guru Sekolah Dasar**

**Di Kabupaten Lima Puluh Kota**



**JURUSAN SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

**PERAN BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PROSES  
PENGAJUAN PERCERAIAN GURU**

**Studi Kasus Perceraian Guru Sekolah Dasar  
Di Kabupaten Lima Puluh Kota**

**SKRIPSI**

Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas

Oleh

**REZKY AGUS RYANTO**

**BP.1210813005**

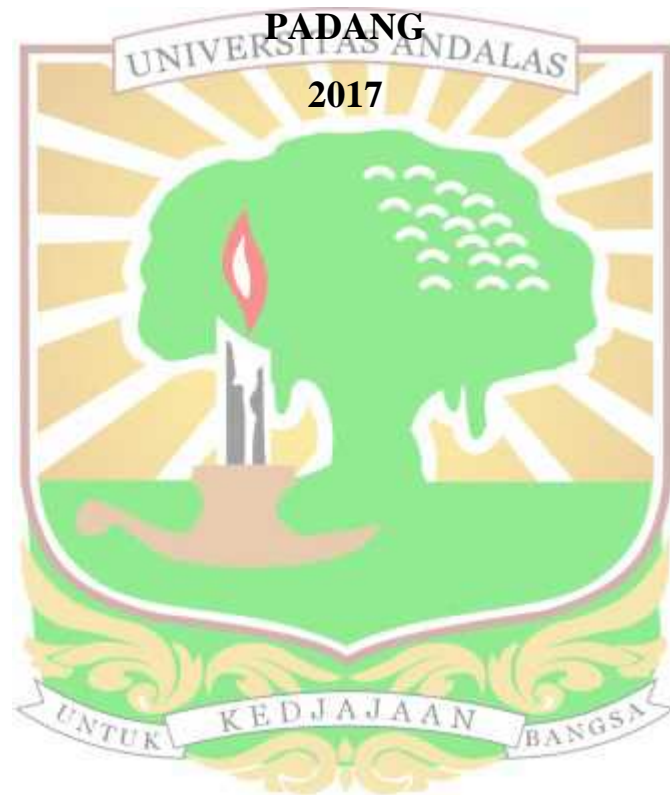
**Dosen Pembimbing**

**Dr. Bob Alfiandi, M.Si**

**Dra.Fachrina, M.Si**



**JURUSAN SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**



## ABSTRAK

**Rezky Agus Ryanto, 1210813005, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Peranan Birokrasi Pemerintah Dalam Proses Pengajuan Perceraian Guru Studi Pada Kasus Perceraian Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembimbing I Dr. Bob Alfiandi, M.Si, Pembimbing II Dra.Fachrina, M.Si**

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat ketidakjelasan rumusan. Sehingga dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dilakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. Berdasarkan hasil temuan data di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa tingkat perceraian Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2016 meningkat pada tahun-tahun sebelumnya dan angka tertinggi perceraian terjadi pada guru sekolah dasar. Melihat kondisi ini menarik peneliti untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terkait birokrasinya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purpose sampling* dan dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori tipe ideal birokrasi oleh Max Weber.

Hasil penelitian menunjukkan peran birokrasi pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, bagi guru sekolah dasar yang ingin bercerai harus melakukan proses pengajuan perceraian terlebih dahulu ke instansi-instansi pemerintah terkait untuk mendapatkan izin bercerai ke pengadilan agama. Kemudian terdapat kekurangan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut yaitu belum adanya kualifikasi penempatan pegawai negeri yang terspesialisasi secara khusus untuk menangani perkara guru yang ingin bercerai. Selain itu hal yang mendukung tentang bagaimana melakukan Pembina dan mediasi kepada pihak berperkara seperti mengadakan pelatihan-pelatihan secara khusus bagi pegawai negeri yang berwenang juga belum dilakukan oleh pemerintah.

## *ABSTRACT*

**Rezky Agus Ryanto, 1210813005, Sociology Department, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang.** **Scripton Title: The Role of the Bureaucracy of the Government in the Process of filing a Teacher Divorce, Study on Divorce Cases Elementary School Teacher in District Lima Puluh Kota. Supervisor I, Dr. Bob Alfiandi, M.Si, Supervisor II, Dra.Fachrina, M.Si**

In practice, some of the provisions of Regulation No. 10 in 1983 about marriage and divorce to permit civil servants there is vagueness of the formulation. So was government regulation Number 45 in 1990 which is done by adding the refinements and or change some of the provisions of Regulation No. 10 in 1983. Based on the findings of the District Court of Religious data in Lima Puluh Kota showed that the divorce rate is civil servant in 2016 increases in previous years and the highest number of divorce occurs at the primary school teachers. See these conditions attract researchers to find out how the role of related government bureaucracy in the implementation of the Government Regulation Number 45 in 1990 about marriage and divorce permits civil servant.

This research was conducted with the qualitative and descriptive approach. The informants were selected by using purposivesampling and data collection is used by observation technique and deep interviews. Theory that used is the theory ideal type bureaucracy by Max Weber.

The results showed the role of the bureaucracy of the government in the implementation of the Government Regulation Number 45 in 1990, for primary school teachers who wish to divorce should do the divorce filing in advance to related government agencies to get permission to divorce to court. Then there are shortcomings in the implementation of government regulations, yet the existence of a qualifying placement of specialized civil servants specifically to deal with the matter of teachers who want to get divorced. In addition to it's support on how to do the builder and mediation to the litigants as conduct trainings specifically for civil authorities also have not been done by the Government.

